



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT**

**RDPU PANJA PERGURUAN TINGGI KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI - PEMUDA DAN
OLAHRAGA - PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN
NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2022 – 2023.
Masa Sidang ke-	: III
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: KADIN dan HIPMI
Hari/Tanggal	: 17 Januari 2023
Pukul	: 13.00 WIB – Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (Fisik dan Virtual Menggunakan Zoom).
Pimpinan Rapat	: Dr. Dede Yusuf Macan Effendi, ST. M.I.Pol/Wakil Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI
Agenda acara	: 1. Kondisi dan tantangan daya serap lulusan Perguruan Tinggi pada Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI); 2. Penguatan mutu dan daya saing Perguruan Tinggi; 3. Masukan dan rekomendasi penguatan Perguruan Tinggi.
Hadir Komisi X DPR RI	: 18 orang dari 29 orang Anggota Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: 1. Adi Mahfudz Wuhadji (Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan KADIN) 2. Sabda PS (Ketua Komite Tetap Teknologi Pendidikan KADIN) 3. M. Nurreza Rachman (KADIN) 4. Gama Anom Yogotomo (KADIN) 5. Hari Wijaya (KADIN) 6. Akbar Himawan Buchari (Ketua Umum HIPMI) 7. Syaifuddin H.S (Anggota HIPMI) 8. M. Aufar Sadat Hutapea (Anggota HIPMI) 9. Lutfi Ginanjar (Anggota HIPMI) 10. Ariyo DP Irhamna (Anggota HIPMI)

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 13.23 WIB oleh **Dr. Dede Yusuf Macan Effendi, ST. M.I.Pol/Wakil Ketua Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam

pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan narasumber dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIMPMI), menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI.

II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

- A. Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada narasumber yang telah menyampaikan paparan, masukan, dan saran mengenai Perguruan Tinggi (bahan terlampir), dengan beberapa poin utama antara lain:
1. Kamar Dagang dan Industri (KADIN), menyampaikan antara lain:
 - a. Indonesia memiliki 4481 lembaga Perguruan Tinggi dan 5% populasi di Indonesia merupakan lulusan Sarjana Perguruan Tinggi;
 - b. Lulusan Perguruan Tinggi yang *underskill* tidak terserap oleh lapangan kerja dan atau tidak berkontribusi optimal dalam dunia kerja. 87% mahasiswa mengaku salah jurusan, 72% pekerja memiliki profesi yang tidak sesuai jurusan, 52% pekerja di Indoensia *underqualified*;
 - c. Hipotesa utama pendorong rendahnya daya serap/ kontribusi lulusan perguruan tinggi diantaranya: minimnya input DUDI terhadap kurikulum, Industri berkembang lebih cepat daripada sistem pendidikan, Terbatasnya akses mahasiswa ke dunia kerja, dan Keterkaitan yang tidak pasti antara Pendidikan tinggi dan kesempatan kerja;
 - d. Penetapan standar bersama antara Perguruan Tinggi dengan DUDI untuk menunjang keterserapan sarjana, meliputi: *Fundamental skill*, *Soft skill*, *Spesific skill*, dan *Multidisciplinary skill*;
 - e. Diperlukan sumber daya yang berkualitas dan kompetitif untuk menciptakan output lulusan yang dapat diserap DUDI
 - f. Untuk menghasilkan lulusan yang bisa terserap oleh DUDI, beberapa Langkah awal penyaringan mahasiswa bisa dilakukan: Strategi penguatan belajar dari jenjang sebelumnya (Pendidikan dasar dan menengah), dan Seleksi masuk Perguruan Tinggi dilaksanakan dengan transparan dan selektif memenuhi standar;
 - g. Usulan dan Rekomendasi untuk Perguruan Tinggi Indonesia:
 - i. Pemisahan proses antara belajar dan asesmen
Idealnya beberapa *knowledge/skills* yang kritical dipisahkan antara proses belajar dan asesmen
 - ii. Membuat perguruan tinggi lebih inklusif
 - Kolaborasi aktif dengan DUDI (target kerjasama Tahunan/MoU)
 - Proses pembelajaran yang dapat dilakukan / berasal dari mana saja dengan mengacu pemenuhan kompetensi jurusan
 - iii. Penekanan pada pentingnya *Fundamental Skill* dan *Soft Skill* saat seleksi masuk dan syarat kelulusan
 - iv. Penguatan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi

Implementasi Perpres 68 Tahun 2022 bersama seluruh stakeholder terkait.

2. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), menyampaikan antara lain:
 - a. Per Februari 2022, tingkat pengangguran di Indonesia sebesar 5,83% dari total penduduk usia kerja sebanyak 208,54 juta orang. Sebanyak 12,26% diantaranya adalah lulusan diploma dan sarjana (S1);
 - b. Pentingnya penguatan mutu Pendidikan Tinggi untuk menciptakan wirausaha baru, dengan: Mendorong inkubator bisnis sebagai ventura builder untuk *sustainable business*, dan Komersialisasi hasil riset dan inovasi;
 - c. Mendorong pemerintah melalui dunia pendidikan harus dapat mencetak lulusan yang memiliki pola pikir untuk membangun kewirausahaan;
 - d. Usulan dan rekomendasi kebijakan, diantaranya:
 - i. Penguatan inkubator bisnis di setiap kampus sebagai *venture builder* yang tidak hanya membina tapi bertanggung jawab terhadap keberlanjutan bisnis
 - ii. Penguatan kolaborasi antara civitas akademika dengan mahasiswa untuk akselerasi pertumbuhan wirausaha
 - iii. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang efektif dan berkala ke pelaku usaha daerah dan pendampingan secara berkala dan masif dengan melibatkan asosiasi pelaku usaha terkait:
 - Program Kedaireka *Matching Fund*;
 - Skema kerjasama dengan perguruan tinggi terkait hasil riset;
 - Peta hasil riset berdasarkan perguruan tinggi dan industri/produk yang siap dikomersialisasi.
 - iv. Peningkatan Peran Swasta dalam pemanfaatan dan komersialisasi hasil riset dan inovasi melalui:
 - Pembangunan *Innovation Demand Side* dan *Matching Fund* untuk Kegiatan Riset dan Inovasi tentunya dengan memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan industri dengan kapasitas pelaku riset dan inovasi;
 - Optimalisasi program Kedaireka *Matching Fund* khususnya untuk membantu industri berinvestasi dalam pengadaan hak kekayaan intelektual agar banyak invensi yang dapat dikomersialisasikan (tidak berhenti di paten saja);
 - Inisiasi berbagai skema *blended financing* untuk kegiatan riset inovasi serta komersialisasinya;
 - Inisiasi skema insentif untuk pihak swasta/industri yang terlibat langsung atau berinvestasi dalam kegiatan riset dan inovasi serta komersialisasinya
 - v. Optimalisasi Peran BUMN: *upscaling* dan komersialisasi produk inovasi lembaga litbang dan PT.

3. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan antara lain:
 - a. Mendukung KADIN dan HIPMI untuk terus melakukan kolaborasi dengan Perguruan Tinggi dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam menghadapi Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI);
 - b. Mendorong KADIN dan HIPMI untuk melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, terutama dalam penyesuaian kurikulum dengan kemampuan lulusan perguruan tinggi;
 - c. Perlunya kejelasan terkait *manpower planning*, diantaranya meliputi: bidang yang dibutuhkan oleh DUDI, kompetensi yang harus dimiliki, dan ketercukupan tenaga kerja yang tersedia, sehingga Perguruan Tinggi dapat menyesuaikan kurikulumnya (terjadi *link and match*);
 - d. Menghimbau KADIN dan HIPMI agar secara aktif memberikan masukan kepada Pemerintah untuk menyempurnakan Kebijakan Perguruan Tinggi dan program turunannya dan memberikan kontribusi pemikiran secara kritis terhadap pembangunan Pendidikan di Indonesia;
4. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU hari ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI kepada Pemerintah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 15.35 WIB.

KETUA RAPAT,



Dr. Dede Yusuf Macan Effendi, ST. M.I.Pol

